

Voice of Wesley

JURNAL ILMIAH MUSIK DAN AGAMA

**PERANAN ORANG KRISTEN DALAM PUSARAN POLITIK DI INDONESIA
(SUATU TINJAUAN HISTORIS - TEOLOGIS)**

Prof. Dr. SAMUEL BENYAMIN HAKH

**POLITIK MENURUT ALKITAB DAN IMPLIKASINYA BAGI PERAN GEREJA
DALAM PUSARAN POLITIK DI INDONESIA**

Dr. ADOLF BASTIAN SIMAMORA

PEMIMPIN YANG MENGHAMBA, BUKAN DIPERHAMBA

Dr. HARUN Y. NATONIS, S.Pd, M.Si

**ENTITAS GEREJA DALAM BERPOLITIK DI INDONESIA
(TINJAUAN SUDUT ETIKA KRISTEN)**

NI NYOMAN FRANSISKA M.Th

**PEDAGOGI HATI: MODEL PAK SEBAGAI PENDIDIKAN POLITIK
BAGI WARGA GEREJA DI INDONESIA**

Dr. ODITHA R. HUTABARAT

**PENDIDIKAN POLITIK:
TELAAH MATERI AJAR PAK DI PERGURUAN TINGGI UMUM**

Dr. BINSSEN S. SIDJABAT

**TEOLOGI POLITIK UNTUK KEADILAN
RESPONS TEOLOGIS GEREJA DI TENGAH MENGUATNYA POLITIK IDENTITAS**

Dr. DJOYS ANNEKE RANTUNG, M.Th

**ANALISIS KRITIS TERHADAP PEMBERLAKUAN UU RI NOMOR 21
TAHUN 2001 DI TANAH PAPUA**

Dr. LENIS KOKOYA, M.Th., M.Pd.K



Sekolah Tinggi Theologia Wesley Methodist Indonesia

Jl. Babakan Madang No. 40, Gedung TMO Lantai 3, Sentul City 10810

021-29095254, 29095255

VOICE OF WESLEY
JURNAL ILMIAH MUSIK DAN AGAMA

VOLUME 2 . NOMOR 1
NOVEMBER 2018

Daftar Isi

PENGANTAR EDITORIAL

PERANAN ORANG KRISTEN DALAM PUSARAN POLITIK DI INDONESIA (SUATU TINJAUAN HISTORIS – TEOLOGIS)

Samuel Benyamin Hakh 1

POLITIK MENURUT ALKITAB DAN IMPLIKASINYA BAGI PERAN GEREJA DALAM PUSARAN POLITIK DI INDONESIA

Adolf Bastian Simamora 21

PEMIMPIN YANG MENGHAMBA, BUKAN DIPERHAMBA

Harun Y. Natonis..... 37

ENTITAS GEREJA DALAM BERPOLITIK DI INDONESIA (TINJAUAN SUDUT ETIKA KRISTEN)

Ni Nyoman Fransiska 52

PEDAGOGI HATI : MODEL PAK SEBAGAI PENDIDIKAN POLITIK BAGI WARGA GEREJA DI INDONESIA

Oditha R. Hutabarat..... 69

PENDIDIKAN POLITIK: TELAAH MATERI AJAR PAK DI PERGURUAN TINGGI UMUM

Binsen S. Sidjabat..... 86

TEOLOGI POLITIK UNTUK KEADILAN RESPON TEOLOGIS DI TENGAH MENGUATNYA POLITIK IDENTITAS

Djoys Anneke Rantung..... 108

ANALISIS KRITIS TERHADAP PEMBERLAKUAN UU RI NOMOR 21 TAHUN 2001 DI TANAH PAPUA

Lenis Kokoya 123

PENDIDIKAN POLITIK: TELAAH MATERI AJAR PAK DI PERGURUAN TINGGI UMUM

Oleh: Binsen S. Sidjabat¹

STA Tiranus
Bandung
bssidjabat11@yahoo.com

Abstrak

Pendidikan Agama Kristen (PAK) memiliki peran penting membimbing peserta didik memahami hubungan iman Kristen dengan beragam aspek kehidupan, termasuk politik. Paparan di bawah ini menerangkan bagaimana materi ajar PAK terkait politik untuk membekali mahasiswa. Telaah terhadap materi PAK di tingkat perguruan tinggi dari empat sumber dipilih, mengajak pendidik Kristen baik dalam konteks sekolah maupun dalam konteks gereja untuk mengembangkan materi kurikulum pembelajaran yang lebih relevan dan kreatif.

Kata kunci: *pendidikan agama Kristen, politik, perguruan tinggi, materi ajar.*

Abstrak

This article considers that Christian Religious Education is significant to guide students understand Christian faith and its application to all aspects of life, including the dimension of political responsibility. This article then describes the messages of curriculum materials used in teaching Christianity in higher education institution. The exploration of four main textbooks is intended to motivate Christian educators both in university and church contexts to develop a more relevant teaching materials and creative learning process.

Key words: *Religious Education, politics, higher education, learning materials.*

1. Pendahuluan

Perlunya pendidikan politik bagi warga gereja dari remaja, pemuda, dewasa awal hingga lanjut usia, sangat tampak dewasa ini. Tidak sedikit warga jemaat memandang politik tabu untuk dibicarakan, karena sikap dan perilaku partai-partai politik dan para politisi yang dianggap kurang sesuai keinginan hati mereka. Warga jemaat dapat menyimak informasi media sosial tentang pejabat pemerintah dan atau anggota dewan perwakilan rakyat di tingkat pusat maupun daerah, melakukan korupsi lalu berurusan dengan pengadilan kemudian dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan.

Pendidikan Agama Kristen (PAK) penting perannya di dalam sistem pendidikan nasional. Hal itu diperlihatkan oleh peluang terbuka bagi pendidikan konteks sekolah hingga perguruan tinggi guna mengelola pembelajaran agama dan budi pekerti. Undang-undang pendidikan nasional (No. 20 tahun 2003, Pasal 12, Ay. 1) menjadi landasan yuridis bagi guru

¹Binsen S. Sidjabat (Ph.D) adalah dosen Pendidikan Kristen di Sekolah Tinggi Alkitab Tiranus, Bandung, sekaligus menjabat Ketua.

dan dosen pendidikan agama Kristen, untuk melaksanakan tugas mereka. Sejak beberapa tahun lalu PAK telah diintegrasikan pula ke dalam pendidikan karakter (Lase, 2007).

PAK bertujuan untuk menuntun peserta didik dalam tingkat perkembangannya memahami iman Kristen yang akan memperkaya iman, moral dan spiritualitasnya, dalam melaksanakan tugas dan panggilan hidup. Dalam perkataan lain, PAK bukan hanya menjadi arena dimana pengajar dan pembelajar membahas iman Kristen sebagai doktrin berdasarkan Alkitab dan tradisi gereja, tetapi juga membahas iman Kristen sebagai kehidupan. PAK mengingatkan pengajar dan membimbing pembelajar menyatakan kehidupan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelas, kita dapat menyimak paparan pakar PAK mengenai tujuan dan tugas pendidikan Kristen di bawah ini.

Groome (1980) memandang PAK sebagai upaya menuntun peserta didik sebagai pembuat sejarah kehidupan, memahami Kerjiaan Allah, dan memiliki iman secara kognitif, afektif dan konatif dalam arti mewujudkan dalam melaksanakan tugas dan panggilan hidup (35-81). Bagi Wilhoit (1991), PAK harus menuntun peserta didik memahami ajaran Alkitab, kemudian menemukan serta memberi makna dalam kehidupan, serta hidup setia sebagai orang Kristen (14-15). Dalam pemahaman Astley (2000), PAK merupakan bimbingan bagi peserta didik mengerti arti menjadi manusia bagi diri sendiri dan sesama, bagi dan di hadapan Allah, dan menyatakan pengalaman hidup bersama Allah dalam tugas keseharian (7-11). Belakangan ini Seymour (2014) mengusulkan agar PAK merupakan upaya pembimbingan peserta didik mengenal pribadi dan ajaran Yesus Kristus, dan mewujudkan nilai-nilai hidup Kristus dalam memenuhi panggilan dan tugas hidup serta dalam menghadapi beragam tanggung jawab dan tantangan maupun peluang (21-45).

Menyimak hakikat dan tujuan itu, maka tanggung jawab Kristen dalam bidang politik juga patut dibicarakan oleh pengajar dan pembelajar. Tan Giok Lie (2013) mendesak pendidik Kristen di Indonesia perlu memahami konteks yang menantang gereja dan sekolah, termasuk kekuatan-kekuatan masyarakat dan partai-partai politik, supaya dapat memberikan pelayanan pembinaan warga gereja secara efektif. Hal serupa juga dikemukakan oleh Elizabeth Phillips (2012) tentang perlunya pengenalan tentang beragam pendekatan pendidikan politik dari sudut iman Kristen, lalu memaknainya dalam konteks dimana peserta didik beraktivitas.

Generasi muda khususnya yang belajar di perguruan tinggi, berusia 18-25 tahun, adalah individu yang tengah bertumbuh meresponi beragam tugas-tugas kehidupan baik untuk kepentingan pribadi, keluarga dan komunitasnya. Mereka itu patut mendapat bimbingan bagaimana memahami panggilan Kristen dalam kehidupan politik di tanah air, agar bersikap positif, kritis dan konstruktif serta dinamis dalam meresponi beragam tantangan terhadap kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, seperti dewasa ini. Sebab, kita dapat

melihat adanya upaya-upaya untuk mengubah dasar dan haluan negara kepada yang bukan berdasar kepada Pancasila, UUD 45, kebhinekaan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Upaya demikian pada dasarnya merupakan pengkhianatan kepada komitmen para pendiri negara dan bangsa ini.

2. Masalah dan metode

Terkait dengan penjelasan di atas agar pengajar PAK dapat memiliki wawasan yang memadai, maka diperlukan model materi pembelajaran tentang politik yang dapat dipahami dan untuk membangun penyiapan lebih baik. Terkait dengan kebutuhan itu uraian ini membahas materi PAK tentang politik dalam empat model materi ajar PAK di perguruan tinggi, yang ditulis dalam kurun waktu berbeda. Hasil telaah dari keempat materi ajar itu diharapkan berguna untuk memperlihatkan pentingnya pendidikan politik dari iman Kristen, baik di perguruan tinggi, gereja dan perkumpulan pelayanan kaum muda di luar gereja.

Pertanyaan yang menuntun keseluruhan telaah dokumen tertulis ini adalah: Apa yang dikemukakan oleh para penulis materi ajar PAK di perguruan tinggi mengenai tanggung jawab mahasiswa atau generasi muda, yang kelak akan menjadi cendekiawan di tengah masyarakat, dalam kehidupan politik? Metode yang ditempuh mewujudkan studi ini ialah penelitian literatur dengan pendekatan deskriptif analisis dan evaluatif. Menurut Bloor dan Wood (2006:53-60), Warren dan Karner (2015: 169-207) studi ini merupakan penelitian kualitatif menempuh metode kajian dokumen (*document analysis*) dan telaah pemaparan (*discourse analysis*).

Sumber data primer ialah tulisan-tulisan dalam buku materi ajar PAK di Perguruan Tinggi tentang iman Kristen dan politik. Ada empat sumber belajar PAK konteks perguruan tinggi yang menjadi fokus kajian. Pertama, *Mengasihi Tuhan Allah dan Sesama Manusia: Pendidikan Agama Kristen Untuk Perguruan Tinggi di Indonesia* (1999). Kedua, *Iman Di Tengah Masyarakat: Penuntun Kuliah Pendidikan Agama Kristen* (U.T.Saputra, 2004). Ketiga, *Materi Ajar Matakuliah Pengembangan Kepribadian: Pendidikan Agama Kristen di Perguruan Tinggi* (2007). Keempat, *Pendidikan Agama Kristen* (John Haba, dkk., 2008). Yang menarik ialah bahwa sumber pertama ditulis sebelum reformasi. Tiga sumber berikutnya pada masa setelah reformasi. Analisis terhadap sumber-sumber kajian ini menghasilkan empat jenis penjelasan tentang tanggung jawab Kristen dalam politik.

3. Analisis dan deskripsi

3.1. Iman Kristen dan Politik dalam Materi Ajar PAK Sebelum Reformasi.

Materi ajar PAK berjudul *Mengasihi Tuhan Allah dan Sesama Manusia: Pendidikan Agama Kristen Untuk Perguruan Tinggi di Indonesia* (1999) terdiri dari sejumlah topik yang diedit oleh almarhum Pdt. Dr. A.A. Sitompul. Buku ini memuat tujuh pokok bahasan yaitu: manusia, agama, gereja, iman Kristen dan IPTEK, mahasiswa dan pembangunan, etika dan iptek, serta kapita selekta. Secara keseluruhan materi ajar memuat dua puluh topik pengajaran yang dapat dipercahkan oleh dosen bersama mahasiswa. Materi ajar ini hadir pada masa dimulainya gerakan reformasi (1998), kemudian diterbitkan satu tahun berikutnya. Oleh karena itu yang menjadi konteks sosial dan politik dari topik-topik bahasan di dalam buku itu ialah warisan Orde Baru.

Secara garis besar buku ini mulai dengan bahasan tentang manusia, yang mengajak mahasiswa mengerti hakikat dirinya, tanggung jawabnya dan hubungannya dengan keutuhan ciptaan (10-38). Dalam bahasan agama, mahasiswa berkenalan dengan pengertian agama dan hakikat agama Kristen (39-57). Dalam bahasan gereja, mahasiswa dapat membaca hakikat gereja, keesaan gereja, dan dinamika gereja di Indonesia (58-74). Dalam bahasan iman Kristen dan politik, dosen dapat mengajak mahasiswa mendiskusikan sikap hidup Kristen terhadap iptek dan hubungannya dengan iman. Hubungan iman dengan seni tidak disertakan (75-95). Dalam bahasan etika dan iptek, dibicarakan etika ilmu pengetahuan dan teknologi, etika kerja, profesi dan jabatan, serta etika seksual (128-161). Dalam bagian kapita selekta, aspek-aspek bioteknologi, okultisme primitif dan modern, pluralitas agama dan pluralisme, serta tugas mendesak dari pendidikan Kristen merupakan pokok-pokok bahasan (62-197).

Tanggung jawab mahasiswa Kristen dalam politik dibicarakan dalam pokok bahasan “Mahasiswa dan Pembangunan.” Pada masa sebelum reformasi itu banyak topik diskusi teologi juga selalu dihubungkan dengan pembangunan. Tidak jelas nama penulis pokok bahasan ini. Tiga sub tema yang disajikan di dalamnya adalah tanggung jawab mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (96-106), hakikat kebersamaan dan kepelbagaian (107-112), dan pembangunan sumber daya cendekiawan muda (113-127).

Yang menarik, materi ajar sebelum reformasi ini mengajukan tiga pertanyaan pengarah, yakni: *Bagaimana tanggung jawab mahasiswa Indonesia yang berkualitas dalam partisipasi berbangsa, bermasyarakat dan bernegara dilihat dari dimensi-dimensi tanggung jawab HAM? Dengan kata lain, apa yang dapat diberikan mahasiswa bagi bangsa, Negara dan masyarakat dalam aspek-aspek nasionalitas, demokrasi serta HAM? Sebagai mahasiswa*

Kristen, apa ciri khas pemaknaan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara yang direalisasikan? (97).

Mengenai tanggung jawab mahasiswa (18-25 tahun) membangun kualitas dirinya, materi ajar ini menekankan perlunya penemuan jati diri secara Kristen, memahami esensi kekristenan yakni “kejujuran di dalam kasih dan kasih yang jujur” (99). Selain memiliki jati diri secara rohani, dikemukakan pula bahwa mahasiswa Kristen patut mengembangkan jati diri kebangsaan, kesetiaan kepada jati diri sendiri, di samping memiliki misi hidup sebagai makhluk ciptaan Tuhan (99).

Sebagai bagian dari tanggung jawab mahasiswa sebagai warga negara, ditegaskan pentingnya pengertian tentang kekuasaan negara dan aparaturnya. Disarankan mahasiswa harus mampu mengidentifikasi secara kritis perilaku yang menyimpang dari pemegang kekuasaan negara, kemudian menyuarakan penyimpangan itu secara bijak sebagai bagian dari gerakan moral. Tepatnya dikemukakan:

Mahasiswa perlu memahami tata kekuasaan dan tata keadaan negara. Mereka perlu peduli agar layanan kemasyarakatan itu tidak menyeleweng, tidak statis, tetapi berkembang dinamis menuju penciptaan, terobosan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk mensejahterakan dirinya. Ini merupakan tanggung jawab mahasiswa memberdayakan diri dengan kecendekiawanannya di dalam moral bernegara. (100)

Kemudian, materi ajar ini mengajak mahasiswa mempercakapkan tanggung jawab bermasyarakat secara proaktif. Ditegaskan bahwa “bermasyarakat merupakan aksi yang luas, mulai dari hidup dan bersama masyarakat sampai mewujudkan peluang-peluang yang berarti bagi masyarakat lokal.” Ditambahkan pula, bahwa secara praktis perwujudan tanggung jawab bermasyarakat itu “tidak sekedar aksi sosial seperti partisipasi gotong-royong dalam sapta pesona, tetapi juga penciptaan latihan keterampilan dan pasarnya untuk mengatasi masalah pengangguran” (101).

Untuk mewujudkan tanggung jawab dalam masyarakat dan negara, diungkapkan bahwa mahasiswa harus ulet dan tangguh. Mahasiswa Kristen patut giat mengembangkan nasionalismenya, dengan berpegang teguh kepada UUD 1945 dan Pancasila, mengingat “tata kekuasaan di Indonesia ialah Demokrasi Pancasila dan tata pemerintahan yang diatur dalam UUD ’45” (101). Jika hal ini dipahami maka tugas mahasiswa ialah turut serta mengingatkan pemangku kekuasaan negara sebagai abdi rakyat guna mensejahterakan kehidupan masyarakat, bukan untuk kepentingan diri atau golongannya.

Materi ini juga mengajak mahasiswa bersikap kritis dalam arti “memahami etika bernegara dan misi negara mencapai layanan yang bertanggung jawab” berupa pemerataan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Tersirat kuat keinginan penulis materi untuk memotivasi mahasiswa aktif memantau kemajuan pembangunan selama ini. Dengan tegas dinyatakan

bahwa “mahasiswa patut memahami seberapa jauh dan wajar capaian pembangunan itu oleh penguasa bagi rakyatnya” (102). Keputusan lain yang perlu dipahami mahasiswa ialah sebagai berikut:

Mahasiswa pantas mengetahui bagaimana wujud nyata capaian pembangunan itu dari kurun waktu ke waktu. Mahasiswa patut mempelajari data-data hasil dan tindak pembangunan sebagai bukti kesetiaannya bagi moralnya, cermin kecintaannya bagi nusa dan bangsa. Mereka patut memperjuangkan keterbukaan data dan informasi tentang rencana, proses, tindakan dan evaluasi pembangunan itu (102).

Selanjutnya, materi ajar mengajak mahasiswa memahami hakekat demokrasi Pancasila. Setelah menjelaskan demokrasi berupa “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,” kemudian dikemukakan bahwa pemilihan wakil-wakil rakyat yang akan duduk di pemerintahan dan kekuasaan adalah sesuai dengan demokrasi Pancasila. Namun, diingatkan bahwa mahasiswa patut terus mengamati apakah kekuasaan yang dipegang oleh wakil-wakil rakyat itu dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak secara adil dan jujur, atau sebaliknya. Tentang perlunya sikap kritis itu, materi ajar berkata:

Mahasiswa perlu memahami watak kekuasaan itu di tangan penguasa. Sebagai intelektual bangsa mereka perlu dengan logika intelektualnya, bagaimana kekuasaan itu melayani rakyat secara benar. Umumnya aparat kekuasaan itu bila tidak terkendali dapat keluar dari relnya. Demokrasi membawakan hakikat kekuasaan bahwa rakyatlah yang berkuasa dan kekuasaan itu dilakukan melalui perwakilan yang dipilihnya. Kekuasaan itu absah hanya bila pemegang kekuasaan menjaga kepercayaan atas pemberi kuasa itu dan di dalam hal ini adalah rakyat” (104).

Materi yang secara terselubung tampak setuju dengan perjuangan mahasiswa di kala itu (1998) untuk menjatuhkan rezim Orde Baru yang lama berkuasa, akhirnya menyajikan pemikiran tentang perlunya mahasiswa Kristen mengerti tanggung jawab HAM. Ditekankan bahwa pemerintah, penguasa dan rakyat patut menghargai hak-hak azasi individu dan golongan. Untuk membekali mahasiswa melibatkan diri dalam pengelolaan HAM, cakupan tugas itu secara garis besar ditegaskan sebagai berikut:

HAM berkenaan dengan hakikat manusia sebagai mahluk beragama, mahluk ekonomi, mahluk sosial, mahluk politik, mahluk simbolik, mahluk cengkerama, dan mahluk bernaluri keindahan. Secara formal hakikat bawaan ini dituangkan dalam konsep-konsep HAM, antara lain kebebasan memeluk agama, mengatur kehidupan sendiri, mengatur tata sosial atas dasar kesepakatan, berserikat dan mengutarakan pendapat (105).

3. 2. Iman Kristen dan Politik dalam *Iman di Tengah Masyarakat* (2004)

Pdt. U.T. Saputra, penulis materi ajar ini, menyatakan bahwa PAK yang relevan bagi mahasiswa bukan lagi yang bersifat doktrinal, melainkan yang membicarakan iman nyata dalam perilaku keseharian dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk (2004: iii).

Dalam kaitan itu disajikanlah sembilan pokok bahasan yakni: manusia sebagai mahkota ciptaan Allah (2004:1-10); Tuhan Allah, Pencipta, Penyelamat dan Pembaharu (2004:11-18); pengambilan keputusan etis moral (2004:19-28); tanggung jawab Kristen menghadapi IPTEKS (2004:29-42); umat Kristen dalam masyarakat (2004:43-56); umat Kristen menghadapi kebudayaan (2004:57-64); mahasiswa dan politik (2004:65-74); memelihara dan mengembangkan hukum (2004:75-86); dan pluralisme dan agama (2004:87-96).

Mendahului tanggung jawab mahasiswa Kristen dalam bidang politik, Saputra menyediakan paparan singkat tentang panggilan hidup di tengah masyarakat. Dikemukakan bahwa mahasiswa Kristen patut memahami diri mereka sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang oleh kehendak Tuhan menyatakan kasih kepada sesamanya (2004:48-49). Meskipun menghadapi beragam tantangan namun Saputra mengajak mahasiswa untuk membangun optimisme, keteladanan dalam kejujuran, sikap inklusif bukan eksklusif (2004:51-52). Selain itu ia memotivasi mahasiswa agar berkontribusi aktif di tengah masyarakat meskipun menanggung resiko seperti kesalahpahaman dan penolakan (2004:52-53). Di samping hadir dan berkarya sebagai manusia terdidik, mahasiswa Kristen patut tekun berdoa bagi kesejahteraan bangsa dan masyarakat (2004:53-54).

Terkait dengan iman Kristen dan politik, Saputra menjelaskan pengertian politik dan menyebut beberapa sistem politik. Kemudian, ia menegaskan bahwa demokrasi merupakan sistem politik yang tepat bagi bangsa Indonesia karena dua alasan, yaitu: “*Pertama*, rakyat memiliki wewenang yang mekanismenya diatur oleh system hukum untuk secara langsung mengawasi penguasa dan kekuasaan. *Kedua*, melalui sistem demokrasi, dinamika dan keseimbangan kebebasan individu dan keteraturan hidup bermasyarakat dapat dipelihara” (2004:69).

Dalam materi ajar itu, selanjutnya Saputra mengemukakan hubungan iman Kristen dengan negara berdasarkan Matius 22:15-22, Roma 13:1-7, dan 1 Petrus 2:11-17. Inspirasi dari Perjanjian Lama tentang kerajaan Israel juga dijadikan bahan pemikiran untuk mahasiswa. Ditekankan bahwa dalam kerajaan Israel, Allah dianggap oleh umat dan pemimpin sebagai Raja mereka. Namun, Gereja tidak boleh memiliki pemahaman seperti bangsa Israel di masa lalu itu. Warga Gereja berbeda dengan umat Israel di masa Perjanjian Lama. Gereja harus memandang dirinya sebagai lembaga rohani atau komunitas spiritual dengan tugas kenabian. Untuk memperjelas, Saputra menuliskan:

Gereja bukan lembaga politik melainkan lembaga rohani atau komunitas spiritual. Sekalipun demikian, gereja memiliki tanggung jawab, tugas dan misi politik. Gereja terpenggil untuk menjadi nabi, imam dan raja, menjadi saksi Kristus dalam berbagai sendi kehidupan. Kristus sendiri meminta gereja untuk menjadi terang dan garam di tengah dunia (70).

Saputra, lebih jauh mengajak mahasiswa mengerti pentingnya peran warga gereja dalam kehidupan politik. Ada tiga alasan yang dikemukakan. Pertama, untuk mengkritisi pemerintahan yang otoriter. Kedua, bersama segenap anggota masyarakat patut mengawasi pengelolaan kekuasaan supaya tidak hanya bagi kepentingan individu dan golongan. Ketiga, untuk bersama anggota masyarakat membangun “kehidupan bersama yang tertib, aman, adil, dan damai diantara seluruh masyarakat” (71).

Dalam menjalankan perannya sebagai terang dan garam dalam kehidupan politik, Saputra mengusulkan supaya Gereja memohon karunia Roh Kudus untuk memberikan kemampuan membedakan yang salah dengan yang benar, kemudian bersama masyarakat dalam konteks mengupayakan terwujudnya yang baik dan benar itu. Hal ini disebutnya sebagai peran inspiratif. Sejalan dengan itu, Saputra menekankan perlunya peran kritis, dimana Gereja patut turut serta dengan masyarakat menentang hal-hal yang dilihatnya bertentangan dengan kehendak Allah (71).

Dalam menjalankan tanggung jawab politiknya, saputra mengajak mahasiswa untuk mehamai bahwa warga Gereja tidak boleh memiliki tujuan hanya untuk merebut kekuasaan, melainkan untuk mendatangkan “keadilan, kesejahteraan, kesetaraan dan perdamaian” bagi masyarakat (71). Dengan tegas Saputra mengingatkan bahwa dukungan Gereja dan warga tidak boleh tertuju kepada partai politik tertentu secara parsial, “melainkan kepada prinsip keadilan, prinsip kebenaran, prinsip kejujuran, prinsip kesetaraan, prinsip perdamaian” (72). Dalam perkataan lain, Saputra menolak keterlibatan mahasiswa dalam politik praktis yang sifatnya diduga oportunistis.

Hal lain yang juga menjadi masukan Saputra untuk mahasiswa ialah partisipasi mereka di dalam pemilihan umum, dan beragam kegiatan lain yang bernuansa politis. Bagi Saputra, mahasiswa Kristen tidak patut menjadi golongan putih (golput). Nasihatnya dikemukakan sebagai berikut:

Kita harus ambil bagian dalam kehidupan masyarakat. Itu berarti kita terkait dengan problem sosial politik, kendati kita tidak melibatkan diri dalam politik praktis, misalnya dalam PEMILU yang disebut sebagai pesta demokrasi, orang Kristen ikut memilih, pesparawi tingkat nasional perlu diikuti agar kesempatan itu tidak terbuang, hal pencatatan perkawinan anggota-anggota jemaat di kantor catatan sipil, masalah SBKRI dan gnti nama dengan segala implikasinya, perijinan pembangunan rumah ibadah, pajak-pajak, dan lain-lain. Kesemuanya itu meminta kita untuk tidak mengabaikan peran kita di tengah kehidupan bangsa Indonesia (72).

Dalam bagian akhir paparannya, Saputra mengajak mahasiswa untuk partisipatif menentukan aturan hidup bersama masyarakat dan bangsa. Dipahami bahwa sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia, mahasiswa Kristen sebagai warga gereja, sebagai individu dan

kelompok, “juga mengemban tugas untuk turut serta mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 45” (73). Karena itu, dikatakan bahwa mahasiswa patut mempelajari kehidupan sosial dan politik yang berkembang.

Selain itu, jiwa mahasiswa, menurut Saputra, haruslah diwarnai oleh kesediaan bersama-sama dengan rakyat Indonesia lainnya mengatasi krisis nasional yang terjadi, khususnya krisis nilai-nilai hidup, melalui pendidikan yang mencerdaskan, menjunjung demokrasi, menghormati hak azasi manusia, dan melestarikan lingkungan. Saputra bahkan mengingatkan mahasiswa untuk berani mengemukakan pendapat politik, “misalnya dengan mengangkat isu politik tertentu, melakukan studi secara akademis, menyalurkan wacana melalui berbagai media...” (74).

3. 3. Iman Kristen dan Politik dalam *Matakuliah Pengembangan Kepribadian* (2007)

Materi ajar PAK ini hadir dalam masa reformasi di bidang pendidikan termasuk dalam konteks perguruan tinggi, yang menekankan kurikulum berbasis kompetensi. Pengembangan kepribadian mahasiswa di kala itu dipandang pemerintah sangat penting. Dalam kaitan itu, berdasarkan SK No.38/Dikti/Kep/2002 dan SK No. 43/Dikti/Kep/2006, materi kuliah PAK ini menyajikan sembilan substansi kajian, yakni: Tuhan Yang Maha esa dan Ketuhanan; Manusia; Hukum; Moral; Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS); Kerukunan Antar Umat beragama; Masyarakat; Budaya; dan Politik.

Dalam substansi kajian kesembilan yaitu Politik, melalui diskusi materi ajar, diharapkan mahasiswa (1) mampu menjelaskan kontribusi nilai-nilai kristiani terhadap kehidupan berpolitik; (2) mampu menganalisis peranan generasi muda Kristen dalam kehidupan politik untuk mewujudkan persatuan kesatuan bangsa; (3) mampu mendaftarkan sejumlah tantangan (khususnya yang berkaitan dengan kehidupan beragama) yang dihadapi dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa (2007:175).

Materi ajar ini mula-mula mengajak mahasiswa memahami istilah politik berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, dan secara etimologis. Istilah kedua, yang dianggap penting dijelaskan oleh penulis materi ajar ialah sekularisasi. Tampak bahwa penjelasan kedua istilah kurang memadai dikemukakan, sehingga kurang membekali mahasiswa dengan pengetahuan yang tepat.

Selanjutnya, substansi kajian membahas dua hal besar namun dikemukakan secara ringkas. Pertama, diterangkan pengertian partisipasi politik, sebagai “keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik, tidak hanya mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, tetapi setiap proses dan tahapan yang mengarah dan bermuara kepada pengambilan keputusan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak”

(176). Disinggung pula bahwa partisipasi politik berbeda dengan mobilisasi politik, “yang sifatnya menggerakkan masyarakat untuk mendukung kebijakan yang telah ditentukan oleh para pemimpinnya” (176).

Kedua, materi ajar ini menyajikan perspektif Kristen terhadap politik. Ada empat aspek yang dipaparkan untuk dibahas mahasiswa bersama dosen. Pertama sekali dikemukakan pandangan Alkitab terhadap politik dengan hanya mengacu kepada seruan nabi Yeremia untuk umat Yehuda agar mengusahakan kesejahteraan pemerintah dan masyarakat dimana mereka berada (Yeremia 29:4-7). Lalu dikemukakan bahwa hal senada disampaikan oleh rasul Paulus dengan menyebut nats acuan yakni Roma 13:1-7, tanpa memberi uraian tentang pesan apalagi dignifikansinya. Jadi, referensi Alkitab mengenai partisipasi mahasiswa dalam kehidupan politik sangat dangkal.

Seterusnya, didaftarkan dua belas butir prinsip-prinsip Kristiani dalam kehidupan berpolitik, yaitu: kasih, kebangsaan, kemerdekaan, keadilan, kebenaran, kesetiakawanan, tulus, jujur, rendah hati, kepeloporan, kesamaan, dan kesetiaan (179-180). Setiap istilah dijelaskan secara ringkas.

Lebih jauh, materi ajar mengajak mahasiswa memahami partisipasi Kristen dalam dialog dan kerjasama. Ditegaskan bahwa hal itu diperlukan mengingat realitas bahwa bangsa Indonesia sangat majemuk, dan kemajemukan harus dipahami sebagai kekuatan dan kekayaan, bukan kelemahan yang harus dihapuskan. Ditekankan bahwa kemajemukan merupakan kekayaan yang perlu dikelola agar tidak menjadi sumber malapetaka. Oleh karena itu, sikap memandang diri paling benar atau eksklusif, harus dihindarkan. Dalam sebuah alinea, penulis materi ajar ini menyatakan:

Eksklusivitas melahirkan kecurigaan pihak lain, yang pada gilirannya mudah menyulut pertikaian. Untuk menangkalnya dibutuhkan dialog dan kerjasama antarkomunitas-komunitas yang ada guna membina saling pengertian. Dengan demikian diharapkan dapat terwujud suatu komunitas nasional yang didalamnya terdapat berbagai komunitas, dimana dialog dan kerjasama menjadi gaya hidup. Dengan demikian, dialog dan kerjasama adalah bagian fundamental dalam rangka tanggung jawab sosial dan politik. (181)

Akhirnya, materi ajar ini menuntun mahasiswa membahas aspek tantangan dan peluang. Tantangan yang dikemukakan ialah politik identitas, dimana beragam komunitas di masyarakat menekankan pembedaan dirinya dengan yang lain berdasarkan agama. Penulis materi ajar secara tegas menyatakan bahaya dari politik identitas. Dituliskan, “Sering terjadi agama dijadikan *komoditas politik* yang melayani kepentingan sesaat dan sekelompok masyarakat. Politisasi agama seperti ini potensial memunculkan berbagai konflik yang pada gilirannya melahirkan kekerasan keagamaan yang berakar dalam keyakinan keagamaan yang keliru” (182). Mengenai peluang dalam berpolitik, materi ajar tidak memberi penjelasan konkrit.

Namun, secara tersamar dikemukakan bahwa keinginan pemerintah dan masyarakat untuk menghormati dan memelihara kemajemukan untuk kemajuan bersama, merupakan peluang untuk membangun keikutsertaan politik.

Hal menarik dari materi ajar ini ialah disajikannya metode pembelajaran yaitu ceramah, diskusi dan studi kasus. Untuk maksud itu, materi ajar menyajikan empat kasus. Dua kasus menyajikan pernyataan politik mengenai kekerasan terhadap gereja di masa lalu yang terjadi di Jawa Timur (1996). Satu kasus karikatur memberi ruang untuk tanggapan dan diskusi. Kasus terakhir berupa slogan yang perlu diperbincangkan mahasiswa, yakni: *Partisipasi Politik Kristen, Yes; Partai Politik Kristen, No.* (183-186).

3. 4. Iman Kristen dan Politik dalam Pendidikan Agama Kristen (2008).

Materi ajar ini disusun oleh sejumlah penulis untuk mahasiswa Universitas Terbuka dengan nama “Buku Materi Pokok MKDU 4222/3 sks/Modul 1-9.” Berdasarkan SK No. 43/Dikti/Kep/2006, sama seperti bahan ajar di atas, buku ajar ini juga membicarakan sembilan substansi kajian, yakni: Tuhan Yang Maha Esa; Manusia; Masyarakat; Hukum; Moral; Budaya; Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni; Politik; dan Kerukunan Antar Umat Beragama. Tampak bahwa materi ajar tentang Iman Kristen dan Politik ditempatkan dalam urutan kedelapan (Modul 8.3-8.12).

Penulis materi ajar ini, Pdt. Dr. Nazarius Rumpak, mengajak mahasiswa memahami dua hal saja. Pertama, kekuasaan dan pemerintah. Kedua, Iman Kristen dan tanggung jawab politik. Yang menarik, Rumpak mengajukan sebuah pertanyaan pokok yaitu: *Apakah orang Kristen boleh berpolitik?* (8.3). Jawaban yang diberikan ialah bahwa orang Kristen boleh berpolitik mengingat peran politik sebagai alat pengendali kekuasaan agar tidak korup atau disalahgunakan oleh pemangku jabatan di pemerintahan atau oleh mereka yang duduk sebagai perwakilan rakyat. Disinggung pula bahwa Alkitab juga mengisahkan penyalahgunaan kekuasaan di zaman kerajaan Israel (2 Samuel 8:17).

Ketika membahas informasi Alkitab mengenai keterlibatan orang Kristen dalam politik, Rumpak menyinggung pesan Kejadian 1:26-28, dimana manusia diberi Allah mandat untuk mengelola ciptaan. Didasarkan oleh pesan rasul Paulus kepada jemaat di Roma (Roma 13:1), ditegaskan bahwa kekuasaan adalah milik dan pemberian Allah kepada manusia. Karena itulah disebut bahwa pemerintah adalah hamba Allah untuk mengatur kehidupan manusia ke arah lebih baik. Walaupun pemerintah tidak sempurna, materi ajar memotivasi mahasiswa untuk mendukung upaya pemerintah menegakkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat (8.4).

Dikemukakan pula bahwa mahasiswa patut sadar jika kekuasaan cenderung disalahgunakan oleh pemegangnya, dianggap sebagai miliknya, sebagai hasil upayanya, bukan

sebagai pemberian Allah (8.4). Oleh sebab itu, menurut penulis materi ajar, mahasiswa patut melakukan peran kenabian guna mengingatkan penguasa bahwa kekuasaan adalah milik Allah untuk kesejahteraan rakyat dalam negara.

Ketika membahas tanggung jawab Kristen dalam kehidupan politik, materi ajar mengajak mahasiswa memahami beberapa perkara penting. Pertama, ditekankan bahwa mahasiswa tidak sepatutnya menjauhkan diri dari politik melainkan melibatkan diri. Kedua, salah satu cara keterlibatan diri itu ialah berupaya menjadi pemegang kekuasaan dengan strategi yang baik dan benar (8.5). Jika mahasiswa kelak menjadi pemegang kekuasaan, mereka harus menggunakan tugas itu sebagai instrumen memuliakan Allah. Keterlibatan dalam politik patut dipahami sebagai panggilan mulia, dan arena untuk melayani Tuhan dan sesama. Secara tegas Rumpak menyatakan,

Politik adalah sebuah bidang kehidupan dimana setiap pengikut Kristus dapat memperjuangkan terwujudnya tanda-tanda kerajaan Allah dalam Yesus Kristus, yakni keadilan, kebenaran dan damai sejahtera bagi semua orang tanpa membeda-bedakan latar belakang suku, agama, ras, golongan dan sebagainya dari orang yang memegang kekuasaan (8.5).

Bagi Rumpak, keterlibatan lain mahasiswa dalam politik ialah sebagai anggota partai politik (8.6). Namun, jika hal itu terwujud diingatkan bahwa anggota partai politik tidak boleh bersikap eksklusif yakni semata-mata mementingkan diri dan partainya. Orang Kristen sebagai anggota partai patut membawa suara kenabian untuk mengkritisi penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan peraturan dan perundangan yang berlaku. Ditegaskan bahwa berdiam diri dan tidak menyuarakan kebenaran ketika melihat penyimpangan kekuasaan, adalah sikap bertentangan dengan panggilan kenabian orang Kristen. Tepatnya dinyatakan bahwa “berdiam diri dengan alasan ingin bersikap netral jelas bukan pilihan yang tepat, sebab secara tidak langsung ini berarti orang Kristen ikut membiarkan orang-orang yang tertindas dan teraniaya tetap hidup dalam penderitaan mereka” (8.6).

Dengan suara kenabian, orang Kristen dalam politik harus cerdas melihat adanya penyalahgunaan agama dalam merebut, mempertahankan, dan mengendalikan kekuasaan. Dalam konstalasi dinamika politik yang diamati, Rumpak melihat bahwa sentimen agama kerap dipergunakan sebagian kelompok untuk mencapai kekuasaan. Namun, diingatkan bahwa sama seperti dengan agama lain, kekristenan pun tidak patut dijadikan alat legitimasi kebijakan pemerintah yang salah (8.7).

Selanjutnya, orang Kristen yang terlibat dalam politik perlu memahami bahwa ketaatannya kepada pemerintah tidak boleh menghalangi sikap tunduk kepada Allah, sesuai pesan Markus 12:17 (8.7). Bertolak dari pesan Markus itu Rumpak selanjutnya berpendapat:

Karena itu ketaatan yang dapat diberikan kepada pemerintah bukanlah sebuah ketaatan yang mutlak, melainkan sebuah ketaatan yang terbatas, yakni ketaatan yang diberikan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Yesus sendiri mempersilakan orang-orang untuk taat pada kaisar Romawi melalui kesediaan mereka membayar pajak. Namun demikian, tidak semuanya harus diberikan kepada Kaisar. Tetap ada bagian yang dikhususkan bagi Tuhan dan tidak boleh diberikan kepada siapapun, termasuk kepada Kaisar” (8.7).

Hal menarik lainnya yang diingatkan oleh materi ajar ini ialah bahwa Gereja hadir bukan untuk menguasai pemerintah atau membuatnya tunduk. Sebaliknya, bagi Rumpak, Gereja memberikan suara kenabian dalam arti mengingatkan pemerintah untuk bertindak dan bersikap baik kepada rakyat, tidak menyalahgunakan kekuasaan. Melanjutkan gagasan itu, tentang hubungan iman Kristen terhadap politik Rumpak menekankan bahwa iman Kristen hanya memberi “petunjuk tentang bagaimana agar kekuasaan itu sungguh-sungguh dapat dipakai untuk sebuah tujuan yang benar dan adil” (8.8). Lebih jauh dikemukakan bahwa iman Kristen sepatutnya menjadi sumber moral “dari setiap perilaku dan kebijakan politik, sehingga setiap tindakan yang diambil tidak akan membawa dampak yang destruktif bagi umat manusia” (8.8).

Tampaknya penulis materi menyadari bahwa adakalanya orang Kristen yang terlibat dalam politik akan menyuarakan hal-hal yang dianggap pemerintah menentang dirinya atau dipandang sebagai anti pemerintah. Tidak sedikit orang Kristen menghindari politik karena tuduhan demikian. Diingatkan oleh Rumpak, bahwa jika saja orang Kristen sebagai anggota partai mengkritisi pemerintah karena tidak berpihak kepada orang-orang lemah, maka mereka harus meyakinkan bahwa yang diperbuat ialah mengingatkan pemerintah untuk melakukan tugas dan fungsinya, yakni melakukan kebenaran dan keadilan bagi seluruh rakyat.

Pada bagian akhir paparan itu, materi ajar menegaskan bahwa setiap orang Kristen memiliki dua sisi dalam bersikap, yaitu sikap yang positif dan kritis. Orang Kristen harus bersikap positif dalam arti membuang prasangka buruk terhadap pemerintah seraya berdoa baginya agar menjalankan tugas dan fungsi dengan baik. Orang Kristen harus bersikap kritis dalam arti “tidak terkooptasi oleh pemerintah yang pada gilirannya akan mematikan suara kenabian iman Kristen.” Disarankan bahwa “yang penting adalah bagaimana bersikap positif tanpa kehilangan suara kenabian dan bagaimana bersikap kritis tanpa harus anti terhadap pemerintah” (8.8). Materi ajar itu diakhiri Rumpak dengan kegiatan latihan mahasiswa, dengan cara mengerjakan lima tugas. Disajikan pula sebuah rangkuman yang tersusun dengan baik.

4. Hasil Temuan dan Penilaian

Keempat materi ajar PAK di atas merupakan pokok-pokok pikiran para penulis untuk diperbincangkan dosen bersama mahasiswa. Materi pertama ditulis dalam awal masa reformasi

tampak menyuarakan keberanian untuk melakukan kritik terhadap pemerintah yang dinilai menyalahgunakan kekuasaan, dan melakukan pelanggaran HAM di kala itu. Jika kita melihat ke belakang, memang kejatuhan Orde Baru di kala itu adalah disebabkan oleh banyaknya penyalahgunaan wewenang, korupsi merajalela, dan pelanggaran HAM membuat rakyat menderita. Materi PAK pertama itu kurang menunjukkan dasar-dasar Alkitab melainkan lebih menampilkan sikap dan pandangan teologi politik penulisnya. Mahasiswa diajak untuk proaktif dan kritis terhadap kebijakan pemerintah dalam pembangunan, pelaksanaan demokrasi Pancasila dan penegakan HAM.

Pesan materi ajar PAK yang dikemukakan oleh Saputra, tampak mengemukakan respon mahasiswa Kristen terhadap permasalahan bangsa, negara dan masyarakat lima atau enam tahun setelah reformasi. Pemikiran yang disajikan mengajak mahasiswa mampu membaca situasi dan kondisi, lalu dalam terang iman Kristen bertindak bijak. Bekerjasama dengan pihak lain yang berbeda guna menyuarakan keadilan dan kebenaran, bagi Saputra, merupakan perilaku kristiani. Keterlibatan dalam kehidupan politik bagi Saputra menuntut mahasiswa Kristen membangun spiritualitas dan kecerdasan, disamping keberanian menanggung resiko. Secara terselubung Saputra mengajak mahasiswa untuk tidak tenggelam dalam penilaian diri sebagai elemen masyarakat komunitas minoritas. Sama seperti mahasiswa dari kelompok masyarakat mayoritas, mahasiswa Kristen punya hak, dan peluang dalam partisipasi politik secara cerdas dan bermoral. Terselubung pesan dan sikap kearifan pastoral dalam materi ajar yang ditulis Saputra.

Tekanan dari materi ketiga ialah dua belas nilai-nilai yang ditawarkan kepada mahasiswa jika mereka berpartisipasi dalam kehidupan politik. Selain itu, materi ajar menegaskan perlunya sikap positif terhadap kemajemukan dan pentingnya melepas sikap eksklusif agar biasa bekerjasama dengan komunitas dan golongan lain dengan relasi dialogis. Materi ajar ini sudah lebih jauh paparannya dari materi pertama dan kedua, dimana sikap fenomenal yaitu politik diskriminatif dan politik identitas golongan, dikatakan harus diwujudkan. Materi ajar itu menyatakan bahwa orang Kristen pun tidak patut melakukan politik berbasis identitas agama dan budaya, mengingat masyarakat Indonesia yang bhinneka. Pascareformasi, sikap dan praktik politik berbasis identitas ini yang tampak berkembang di tanah air. Untuk itu, materi ajar menyajikan beberapa alinea pemikiran untuk tindaklanjuti dalam diskusi. Dibandingkan dengan dua materi ajar sebelumnya, materi ajar pengembangan dari yang dihasilkan pada tahun 2006, sudah memuat strategi pembelajaran yaitu studi kasus.

Materi ajar keempat sarat dengan suara pastoral dan kenabian. Pertanyaan yang Rumpak, *Apakah orang Kristen boleh berpolitik?* dapat menjadi pembuka awal dalam pembelajaran politik dalam konteks pembinaan warga Gereja. Pertanyaan itu sangat krusial

bagi warga jemaat. Kemudian, mandat kultural berdasarkan Kejadian 1:26-27 yang dikemukakan sangat tepat dalam memotivasi mahasiswa peduli dengan kehidupan politik. Dalam zamannya (bisa jadi dalam masa pemerintahan Presiden SBY), Rumpak tampaknya mengamati penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara dan partai politik. Baginya, hal itu menjadi sebuah alasan kuat memotivasi mahasiswa menjadi anggota partai politik dengan tetap bersikap inklusif, bukan partisan.

Rumpak selanjutnya memperlihatkan sikap positif terhadap politik yaitu sebagai sarana memperlakukan Tuhan dan melayani sesama. Namun tidak dijelaskan sejauhmana tanggung jawab pendeta dalam politik. Selain itu, komentarnya mengenai ketundukan kepada pemerintah yang tidak boleh melebihi ketundukan kepada Allah berdasarkan Markus 12:17, menjadi keunikan materi ajar yang disajikan. Hal lain yang juga khas dalam paparan Rumpak ialah peran Gereja sebagai sumber moral bagi orang Kristen yang memasuki dunia politik. Gereja sebagai institusi agama diingatkan agar tidak menguasai pemerintah apalagi negara. Kemudian, perlunya memelihara keseimbangan sikap positif dan kritis yang diungkapkan, akhirnya menjadikan materi ajar yang ringkas itu melengkapi kekurangan dari tiga materi sebelumnya.

Keempat materi ajar belum memperlihatkan paparan tentang ajaran Alkitab mengenai tanggung jawab Kristen dalam pemerintahan dan politik. Teks yang dipergunakan sangat terbatas yaitu tanggung jawab manusia menurut Kejadian 1:26-27, kasih kepada Allah dan manusia dalam Matius 22:15-22, dan sikap terhadap pemerintah menurut Roma 13:1-7 dan I Petrus 2:11-17. Padahal, dengan memberikan pandangan Alkitab mengenai tujuan pemerintahan seperti di Israel, bagaimana penguasa bisa berhasil dan bagaimana bisa gagal, akan membantu mahasiswa mengerti prinsip kepemimpinan politik. Tulisan ini mengusulkan agar dosen pengampu PAK memberikan paparan yang jauh lebih luas tentang ajaran Alkitab mengenai kekuasaan dan etika politik.

5. Simpulan dan saran

Pokok bahasan iman Kristen dan politik penting dikembangkan dalam PAK di perguruan tinggi. Diperlukan juga buku-buku politik dari perspektif Kristen yang ditulis oleh para politisi selain oleh pendeta dan dosen. Pendidikan politik bagi warga dan pemimpin gereja sangat penting dalam konteks bangsa dan masyarakat Indonesia yang tengah menyongsong pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakilnya pada tahun 2019. Menarik sekali mengamati bahwa perguruan tinggi umum melalui mata kuliah pengembangan kepribadian dan pendidikan agama, membuka ruang interaksi edukatif bagi dosen dan mahasiswa, membahas tanggung jawab dalam kehidupan politik.

Materi ajar yang dibahas memberikan pokok-pokok pikiran yang dapat membantu dosen dan mahasiswa dalam lingkungan perguruan tinggi teologi, menyimak panggilan Kristen dalam pembangunan kehidupan politik di tanah air, agar selaras dengan cita-cita luhur pendiri bangsa, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan komitmen memelihara kemajemukan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keempat materi ajar sederhana itu dapat menjadi sumber gagasan bagi gereja untuk mengelola pembelajaran warga memahami tanggung jawab politik, tanpa harus terlibat dalam politik praktis dan apalagi mengembangkan perilaku politisasi agama.

Dari studi sederhana di atas, tulisan ini menilai sudah saatnya topik pendidikan politik diperkenalkan dalam perguruan tinggi teologi. Sebab, sebagaimana dikemukakan oleh Elizabeth Phillips (2012:674-686) dalam konteks perguruan tinggi teologi, belum terbuka ruang secara signifikan bagi bahasan politik dari segi iman Kristen. Muncul dan berkembang perasaan dan sikap bahwa perguruan tinggi teologi tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Padahal para lulusan perguruan tinggi teologi patut cerdas memahami politik supaya dapat memberi masukan kritis, positif, kreatif dan konstruktif bagi warga jemaat yang dilayani. Dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kepala Gereja, warga jemaat memahami tanggung jawab sosial dan politik (Parrett & Kang, 2009; Ismail, 2013:130-132; Ismail 2018:136-139).

Pembelajaran Etika Sosial dan Politik akan dapat memperkaya pemahaman mahasiswa mengenai tanggung jawab politik warga negara. Para pakar pendidikan politik dari Akademi Leimena, misalnya, dapat membantu komunitas perguruan tinggi teologi dan warga jemaat, dalam aspek yang penting ini. Beragam tulisan yang disajikan dalam beragam kesempatan seminar dan lokakarya, juga dapat menjadi bahan masukan berharga.

Daftar Pustaka

- Anthony, Michael J. 2001. *Introducing Christian Education: Foundations for the Twenty-first Century*. Grand Rapids, Michigan: Baker Academic.
- Astley, Jeff. 2000. *Learning the Way: Research and Reflection in Adult Christian Education*. Leominster, UK: Gracewing.
- Bloor, Michael and Fional Wood. 2006. *Keywords in Qualitative Methods*. London: SAGE Publications.
- Groome, Thomas H. 1980. *Christian Religious Education: Sharing Our Story and Vision*. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
- Haba, John., dkk. 2008. *Pendidikan Agama Kristen: Buku Materi Pokok Modul 4222/3 sks/Modul 1-9*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Ismail, Andar. 2013. "Apakah Yesus Ikut Pemilu?" *Selamat Sehati: 33 Renungan tentang*

- Sehati Sepikir*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 130-132.
- , 2018. "Pilih Gubernur dan Pilih Semangka." *Selamat Mengaku: 33 Renungan tentang Identitas*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 136-139.
- Lie, Tan Giok. 2013. The Context and Challenges of the Church's Educational Ministry in Indonesia. *Christian Education Journal*, 3 (10), 233-240.
- Mengasihi Tuhan Allah dan Sesama Manusia*. (1999). Pendidikan Agama Kristen untuk Perguruan Tinggi di Indonesia. Jakarta: Penerbit Kebangkitan Hidup Baru.
- Materi Ajar Matakuliah Pengembangan Kepribadian: Pendidikan Agama Kristen di Perguruan Tinggi*. 2007. Tim Pengembang Matakuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Agama Kristen. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Bandung: Penerbit Bina Media Indonesia.
- Parett, Gary A., S. Steve Kang. 2009. *Teaching the faith, Forming the Faithful*. Downers Grove, Illinois: Intervarsity Press.
- Pazmino, Robert W. 2008. *Foundational Issues in Christian Education: An Introduction in Evangelical Perspectives*. 3rd Edition. Grand Rapids, Michigan: Baker Academic.
- Phillips, Elizabeth. 2012. Approaching the Approaches: Teaching Political Theology through and within Situatedness. *Political Theology*, 13 (6), 674-686
- Saputra, U.T. 2004. *Iman Di Tengah Masyarakat: Penuntun Kuliah Pendidikan Agama Kristen*. Bandung: Bina Media Informasi.
- Seymour, Jack. 2014. *Teaching the Way of Jesus: Educating Christian for Faithful Living*. Nashville: Abingdon Press.
- Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wihoit, Jim. (1991). *Christian Education: The Search for Meaning*. 2nd Edition. Grand Rapids, Michigan: Baker Book House.
- Warren, Carol A.B, and Tracy Xavia Karner. 2015. *Discovering Qualitative Methods*. Oxford: Oxford University Press.